

Surat Kabar : Koran Tempo  
Subyek : Lumpur

Edisi : 9 - April - 2011  
Halaman : A 6

### **Ahli Geologi Efek Lumpur Lapindo Terus Melebar**

#### **Pakar geologi akan berdiskusi mengenai lumpur Lapindo.**

Ahli geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Amien Widodo, mengatakan efek semburan gas dan penurunan tanah akibat semburan lumpur Lapindo akan terus melebar. Diperkirakan mencapai 3 kilometer dari pusat semburan. Alasannya, rongga tanah di pusat semburan tergerus hingga menyebabkan tanah di sekitar semburan tertarik ke pusat semburan. "Fenomena ini akan terus merembet ke daerah lain," katanya kemarin.

Sementara itu, menurut Amien, metode pengeboran miring (relief well)-lah yang tepat untuk menghentikan semburan lumpur panas. Metode ini ampuh digunakan untuk menghentikan semburan serupa di Brunei Darussalam. Metode ini sempat digunakan, tapi gagal, lantaran pengeboran terlalu dekat dengan pusat semburan. Ia menyarankan agar pengeboran dilakukan di luar kolam penampungan lumpur.

Untuk mendiskusikan fenomena semburan lumpur dan mencari solusinya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berencana mengundang pakar geologi dari Jepang, Australia, dan Amerika. "Acara di tanggul lumpur," kata Kepala Operasi BPLS Soffian Hadi kemarin. Acara ini bakal diadakan tepat lima tahun peringatan lumpur Lapindo, yaitu 29 Mei 2011. Para pakar geologi ini rencananya memaparkan teori dan analisis lumpur Lapindo yang pernah mereka lakukan. Di antaranya mengenai potensi semburan lumpur dan penanganan lebih lanjut ke depan.

Adapun BPLS kemarin merayakan ulang tahun keempat lembaga tersebut. Puluhan pegawai dan staf yang bertanggung jawab menangani semburan lumpur Lapindo ini menggelar senam bersama, tasyakuran, dan lomba foto lumpur. Peringatan ulang tahun BPLS ini diselenggarakan dengan sederhana, mengingat masih banyak warga korban lumpur Lapindo yang menderita dan hidup tak tenang. Mereka bermukim tak jauh dari lumpur Lapindo. Banjir dan semburan gas metana mengancam korban yang bermukim di sekitar tanggul penahan lumpur Lapindo.

Seperti yang dialami Mundiharto dan lima warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, lainnya. Mereka tetap bertahan menolak jual-beli lahan. Sebab, BPLS menilai lahannya berstatus tanah sawah seharga Rp 120 ribu per meter persegi. Sedangkan Mundiharto berkeras tanahnya tanah darat, seharga Rp 1 juta per meter persegi. "Tak ada kesepakatan harga, kami tetap menolak pindah," katanya.

Padahal kini seluruh warga Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedung Cangkring telah membongkar rumah dan meninggalkan kampung tersebut.

Sebab, ketiga desa ini akan ditenggelamkan menjadi kolam penampungan lumpur Lapindo.